

## **Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bandung Pasca Pandemi Covid-19**

**Rendy Adiwilaga<sup>1</sup>, Ade Andri Alpriatna<sup>2</sup>, Isnandi Abdul Rozak Riaji<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Bale Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Bale Bandung, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Bale Bandung, Indonesia

Corresponding Author: [rendyadiwilaga@gmail.com](mailto:rendyadiwilaga@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.683>

### **Article Info**

#### **Article History;**

##### **Received:**

2025-09-25

##### **Revised:**

2025-10-02

##### **Accepted:**

2025-12-01

**Abstrak:** Kabupaten Bandung merupakan wilayah di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi wisata yang cukup menarik. Selain wisata alamnya yang kaya, Kabupaten Bandung juga menjadi sentra pelestarian budaya dan situs sejarah yang dinamis dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Barat. Meskipun Pemerintah Pusat telah berulang kali menyelenggarakan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), hingga kini belum ada desa di Kabupaten Bandung yang menembus sepuluh besar di setiap kategori. Adapun pencapaian tertinggi hanya 75 besar di tahun 2022 dan 2023. Terlebih, pasca pandemi covid-19, geliat wisata di Kabupaten Bandung semakin lesu dan berdampak pada ekonomi masyarakatnya. Penulisan ini menggunakan teori Peran dari Pitana & Gayatri yang menjelaskan bahwa peran dapat ditinjau dari tiga variabel, yakni motivator, fasilitator, dan dinamisator. Metode penulisan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta perwakilan Desa wisata di Kabupaten Bandung baik berkategori Desa wisata maju, berkembang dan rintisan. Hasil penulisan menunjukkan dari 100 Desa wisata yang di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung hanya sebagian kecil yang memenuhi kriteria kelayakan sebagai desa wisata yang masuk dan bisa dianggap layak menjadi Desa wisata. Untuk peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung sebagai motivator seperti adanya penyuluhan dan pembinaan, fasilitator seperti adanya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pariwisata dan dinamisator seperti adanya kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam pengembangan desa wisata pasca pandemi Covid-19 belum optimal, terutama karena berbagai hambatan nonteknis seperti faktor politik, lemahnya komitmen kelembagaan, dan kendala administratif hambatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan strategi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berbasis desa pasca pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Peran, Pemerintah Daerah, Desa Wisata, Pengembangan

### **PENDAHULUAN**

Pengembangan kawasan pariwisata harus direncanakan secara matang dan hati-hati, tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi juga untuk menjaga agar nilai dan budaya lokal tidak tergerus oleh perubahan lingkungan (1). Lebih dari itu adanya perencanaan yang matang akan menjaga keberlanjutan kepariwisataan yang akan membentuk budaya pariwisata yang berlandaskan nilai-nilai yang ada tanpa harus kehilangan jati diri masyarakat sekitarnya.(2)

Subjek yang sangat berperan penting dalam mewujudkan kondisi tersebut sejatinya ialah Pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang sejalan tentunya dengan keadaan bahwa kepala Desa dalam pemerintahan desa memiliki peran untuk

memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi (3). Demi merangsang perkembangan wisata di desa serta wujud apresiasi pemerintah pusat terhadap kreasi masyarakat desa, maka Pemerintah Pusat menerbitkan program berjudul Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang sudah berjalan sejak tahun 2021. Sandiaga Salahudin Uno, sebagai Menparekraf pada Sabtu 9 Maret 2024, di Desa Wisata Bungisan, Klaten, Jawa Tengah Mengatakan bahwa ADWI tahun ini tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga membantu desa-desa wisata terpilih untuk memaksimalkan potensi mereka, memperkuat manajemen destinasi, dan memastikan keberlanjutan lingkungan.

Sejak pertama diluncurkan tahun 2021, sebanyak 1.831 Desa wisata menjadi pendaftar di gelombang pertama ini, dimana selanjutnya setiap tahunnya jumlah partisipan terus meningkat. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf melaksanakan program "Kampanye Sadar Wisata 5.0" yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan pembangunan mentalitas serta karakter produk. Pada tahun 2022, jumlah Desa wisata yang terdaftar meningkat dua kali lipat menjadi 3.419 Desa wisata, dan pada tahun 2023, jumlah tersebut mencapai angka yang lebih mengesankan yaitu 4.573 Desa wisata. Sekarang terdapat 4.812 Desa wisata yang terdaftar dalam Jaringan Desa Wisata (jadesta).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, desa wisata yang ingin berpartisipasi dalam ajang pemilihan desa wisata terbaik dapat mendaftar melalui platform resmi di [www.jadesta.kemenparekraf.go.id](http://www.jadesta.kemenparekraf.go.id). Dari pendaftaran tersebut, sebanyak 50 desa wisata terbaik akan dipilih oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) bersama dewan juri untuk dilakukan penilaian langsung. Penilaian desa wisata ini dilakukan berdasarkan lima kategori utama. Pertama, kategori daya tarik desa wisata, yang meliputi keberagaman atraksi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang ditawarkan. Kedua, kategori kesiapan fasilitas dan pelayanan, mencakup infrastruktur dan kenyamanan wisatawan. Ketiga, kategori digital, yang menilai sejauh mana teknologi digital dimanfaatkan untuk operasional dan promosi desa wisata. Keempat, kategori sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan, yang menitikberatkan pada pemberdayaan SDM, kesetaraan gender untuk menciptakan lapangan pekerjaan, serta penguatan organisasi lokal. Kelima, kategori resiliensi, yang menilai kemampuan desa dalam menghadapi risiko alam maupun non-alam, serta upaya pengelolaan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan pariwisata. Ajang ini menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam mendorong inovasi dan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing desa wisata di tingkat nasional maupun internasional (4).

Pemerintah, selain merumuskan berbagai program strategis, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap sektor pariwisata. Hal ini tercermin dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-undang tersebut mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai jenis kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Penerapan kebijakan otonomi daerah menjadi langkah inovatif yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi dan kekayaan wilayahnya secara mandiri. Kebijakan ini membuka peluang bagi daerah untuk memanfaatkan sumber daya alam dan budaya lokal sebagai modal utama dalam mengembangkan sektor pariwisata. Selain meningkatkan daya tarik wisata, langkah ini juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang sedang berkembang di Provinsi Jawa Barat serta saat ini sedang melakukan sebuah terobosan dalam mengembangkan potensi

di daerahnya khususnya di tingkat pemerintah Desa (5). Kabupaten Bandung telah menetapkan visi strategis yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi ini mencerminkan pandangan jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, yaitu: *"Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Religius, Kultural, dan Berwawasan Lingkungan."*

Visi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan kemajuan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik, Kabupaten Bandung berupaya meningkatkan kinerja pelayanan publik, mendorong kemandirian daerah, serta memperkuat daya saing di berbagai sektor. Selain itu, pembangunan pedesaan menjadi prioritas utama sebagai fondasi pengembangan wilayah yang inklusif, memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, serta mengoptimalkan potensi desa.

Visi ini juga mengakar pada nilai-nilai religiusitas dan kultural yang mencerminkan identitas masyarakat Kabupaten Bandung, sembari memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Bandung tidak hanya berdampak pada kemajuan ekonomi, tetapi juga menciptakan harmoni sosial dan keberlanjutan ekologis (6). yang tentunya kesemuanya merupakan sebagai cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang digalangkan melalui pembangunan(7).

Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bandung sendiri dalam implementasinya dikelola secara khusus oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Yang dalam hal ini mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Daya tarik khusus Kabupaten Bandung adalah lokasinya di cekungan Bandung dengan pegunungan di sekitarnya. Gunung Tangkuban Perahu terletak di bagian utara, dan Gunung Patuha dan Malabar terletak di bagian selatan (8). Di sebelah barat cekungan terdapat banyak batuan yang membentuk punggung-punggung tidak teratur. Di sisi timur, Gunung Kerenceng dan Gunung Mandalawangi melindungi cekungan Bandung. Dengan demikian, Kabupaten Bandung memiliki banyak potensi Desa yang dapat dikembangkan dalam hal sumber daya alam dan Kebudayaan. Ada 280 Desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung (9).

Pemerintah Kabupaten Bandung melihat potensi tersebut sebagai sebuah program prioritas.hal ini terlihat dari dikeluarkannya keputusan Bupati Bandung Nomor 556/KEP.770-DISBUDPAR/2022 pada tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan Desa wisata di wilayah Kabupaten Bandung, dimana dari peraturan tersebut ditetapkan 50 Desa Wisata dengan berbagai kategori dari rintisan, berkembang dan maju. Untuk kategori Desa wisata maju ada 2 Desa wisata, Desa wisata yang berkategori berkembang ada 11 Desa wisata dan Desa wisata berkategori rintisan ada 37 Desa wisata, dan melihat dari keputusan Bupati Bandung Nomor 556/KEP.923-DISBUDPAR/2023 pada tanggal 20 November 2023 tentang penetapan Desa wisata di wilayah Kabupaten Bandung. Rata-rata potensi Desa-Desa wisata di wilayah Kabupaten Bandung terdiri dari kekayaan alam, kebudayaan, ekonomi kreatif, dan situs sejarah.

Aneka potensi kekayaan alam Desa-Desa wisata di Kabupaten Bandung sejatinya terdiri dari potensi seperti agrowisata, pertanian, sungai, danau, kebun kopi, bukit, taman hutan, tracking ke alam, peternakan, perkebunan teh, air terjun, serta flora dan fauna endemik Jawa Barat(10). Untuk potensi kebudayaan Desa-Desa wisata di Kabupaten Bandung memiliki memiliki potensi seperti tarawangsa, pegeralan adu domba, pencak silat, kuda renggong, sisingaan, pawai alogoris, rumah adat, wisata religi, situs makam dan kesenian khas daerah Jawa Barat. Serta untuk potensi ekonomi kreatif Desa-Desa wisata di Kabupaten Bandung memiliki potensi seperti pengrajin tusuk sate, makanan dan souvenir ciri khas daerah.Untuk potensi situs

sejarah di Desa-Desa wisata Kabupaten Bandung memiliki potensi seperti goa jepang, goa belanda, sejarah budaya kerajaan kenda dan situs benteng belanda.

Menurut *Pedoman Jilid 2 Desa Wisata* yang disusun oleh delapan kementerian pada tahun 2021, pengembangan desa wisata di Indonesia dibagi ke dalam empat kategori utama, yaitu **Rintisan**, **Berkembang**, **Maju**, dan **Mandiri**. Setiap kategori mencerminkan tingkat kemajuan desa wisata berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Perangkat Desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan pariwisata, bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang menangani pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa, memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan apakah suatu desa layak dikembangkan menjadi desa wisata. Proses evaluasi ini dilakukan dalam jangka waktu dua tahun sebagai periode penilaian awal. Selanjutnya, petunjuk teknis (juknis) yang mengatur klasifikasi desa wisata mencakup prosedur perhitungan, evaluasi, dan penetapan kategori. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan proses pengembangan desa wisata berjalan secara transparan, terukur, dan sesuai dengan standar nasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengembangan desa wisata di Indonesia dapat berlangsung lebih sistematis, memberdayakan masyarakat lokal, serta mendukung kemajuan pariwisata yang berkelanjutan.

Di wilayah Kabupaten Bandung untuk Desa wisata yang masuk dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dalam program Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2021 hanya Desa Alamendah Kecamatan Rancabali yang masuk 50 besar dan Desa Baros Kecamatan Arjasari yang masuk 300 besar, tahun 2022 Desa Baros Kecamatan Arjasari masuk 300 Besar dan untuk tahun 2023 Desa Baros Kecamatan Arjasari masuk 75 besar(11). Melihat hal tersebut Desa wisata di wilayah Kabupaten Bandung yang masuk nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) masih kurang atau sangatlah sedikit di sisi lain potensi begitu besar karena melihat Sumber Daya Alam yang berlimpah seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan obyek keindahan alam khususnya wisata alam serta tidak luput dari sisi kebudayaan yang sangat potensial untuk di kembangkan menjadi daya tarik wisata.

Kondisi Desa di Kabupaten Bandung pasca pandemi covid-19 mengalami proses pemulihan ekonomi yang begitu penuh perjuangan, karena efek adanya wabah covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian khususnya dalam sektor pariwisata. Untungnya pasca meredanya wabah dan pencabutan status nasional, kunjungan wisatawan berangsur-angsur membaik. Hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat untuk kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Wisatawan Nusantara atau lokal ke tempat wisata di wilayah Bandung Kabupaten pada tahun 2021, 2022 dan 2023, yang peneliti tuliskan dibawah ini:

**Tabel 1.** Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata (Orang) Di Kabupaten Bandung

<b>Tahun</b>	<b>Wisatawan Manca Negara</b>	<b>Wisatawan Nusantara</b>	<b>Jumlah</b>
2021	100	1.836.575	1.836.675
2022	1.746	3.782.823	3.784.569
2023	15.833	1.014.251	1.030.084

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021-2023

Dari pembahasan di atas, maka penulis berfokus pada dua bahasan yang kiranya sangat penting. Yang pertama, ialah bagaimana Pemerintah Kabupaten Bandung “menyelamatkan” sektor wisata pasca pandemi covid-19, serta bagaimana pemerintah Kabupaten Bandung mendorong agar desa wisata di Kabupaten Bandung memiliki geliat dan dinamika hidup, yang

ditunjukkan dari masuknya desa wisata di Kabupaten Bandung dalam 10 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi ini bertujuan untuk meneliti sebuah fenomena dengan secara akurat dan sistematis. Pendekatan fenomenologi ini dilakukan karena adanya permasalahan setelah pasca pandemi covid-19 khususnya dalam bidang pariwisata yang menurun drastis dan banyak yang tidak berjalan seperti Desa-Desa Wisata di Kabupaten Bandung. Melihat permasalahan tersebut sangat menarik untuk dipelajari dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang akan menghasilkan sebuah data yang efisien bagi penulis. Menurut Creswell, fenomenologi adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggali makna dari pengalaman hidup individu atau kelompok terkait suatu konsep atau fenomena tertentu. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu mengalami dan memaknai peristiwa, gejala, atau situasi yang dihadapi, termasuk pemahaman mereka terhadap konsep diri dan pandangan hidup. Fenomenologi memberikan perhatian khusus pada sudut pandang subjek, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif secara mendalam. Dengan demikian, metode ini membantu mengungkap dimensi personal dan emosional yang sering kali tersembunyi di balik pengalaman sehari-hari. Hal ini menjadikan fenomenologi alat penting dalam penelitian sosial dan humaniora untuk memahami realitas dari perspektif mereka yang mengalaminya langsung (12).

Terkait pengumpulan data, penulis melakukan beberapa tahapan pengumpulan data, yang pertama melalui observasi, dimana penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan dengan mengamati perilaku dan aktivitas perorangan maupun kelompok di *site* desa wisata percontohan dan bagaimana lingkungan birokrasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung yang sejalan untuk penelitian kualitatif(13). Selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap informan dengan melalui media sambungan telepon, sosial media, hingga wawancara langsung dalam bentuk *focus group discussion*. Dan terakhir penulis melakukan dokumentasi, mulai dari mengambil data secara langsung dalam bentuk wawancara dan dokumentasi foto, maupun melalui sumber literatur yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dokumenter, dan data lainnya yang kiranya relevan menunjang data penulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Sebagai Motivator

Dalam upaya pengembangan sektor pariwisata, peran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung sebagai motivator dinilai memiliki peranan yang sangat penting terutama sebagai pemberi dorongan terhadap perkembangan sektor pariwisata yang dalam konteks penelitian ini terkhusus kepada pengelolaan dan pengembangan potensi wisata khususnya di Desa-Desa wisata di Kabupaten Bandung (14).

Terkait dengan hal tersebut sebagai motivator program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam memotivasi Desa-Desa wisata di Kabupaten Bandung memberlakukan program-program yang dinilai mampu memberikan stimulus terhadap pengembangan desa wisata seperti dengan adanya program BISIKAN DEWI (Bincang Strategi Kembangkan Desa Wisata) yang disertai dengan berbagai kegiatan penyuluhan dan pembekalan terhadap Desa-Desa wisata di Kabupaten Bandung hal ini berkaitan dengan pola komunikasi yang memang harus bersifat intensif untuk menghindari salah pada penafsiran dan mampu

memobilisasi kepentingan secara baik dan terarah<sup>(15)</sup>. Ahmad Ridwan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam wawancara bersama penulis menyebutkan bahwa:

“Untuk anggaran program-program dari Dinas kepada Desa-Desa wisata di Kabupaten Bandung menggunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di ajukan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG), Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik dari Kementrian Ekonomi Kreatif dan Epokir atau aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain dana tersebut, Desa wisata bisa mengajukan sebuah anggaran pada saat MUSRENBANG yang di ajukan melalui pihak Pemerintah Desa serta bertujuan untuk mengadakan sebuah acara pembekalan pada Desa wisata yang turut mengundang jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung”. (Wawancara dengan Wawan Ahmad Ridwan pada tanggal 11 Juni 2024).



**Gambar 1.1** Aktualisasi Program BISIKAN DEWI  
(Bincang Strategi Kembangkan Desa Wisata)

*Sumber: Instagram disbudpar.kabbdg*

Adapun dalam proses kegiatannya program BISIKAN DEWI ini dirancang dengan tujuan sebagai sarana program BISIKAN DEWI dirancang sebagai forum diskusi antara perwakilan Desa wisata yang ada di Kabupaten Bandung dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung mengenai strategi untuk mengembangkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat Desa wisata yang termasuk didalamnya pelatihan, penyuluhan hingga kegiatan peningkatan SDM. Selain itu, program ini juga secara tidak langsung menjadi sebuah wadah bagi para pelaku Desa wisata untuk saling berbagi ilmu dan bertukar pengalaman untuk kemajuan Desa wisata di Kabupaten Bandung.

Dalam temuan penelitian, dinyatakan oleh beberapa informan bahwa program ini secara rutin dihadiri oleh perwakilan 100 Desa wisata yang ada di Kabupaten Bandung yang tentunya program ini secara rutin, terstimulus serta kontinuitas terus menjadi wadah bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam memberikan motivasi pengembangan bagi perkembangan Desa Wisata yang ada di Kabupaten Bandung terlebih dalam kegiatan ini, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung sebagai promotor juga mengundang akademisi, penggiat swasta hingga kementerian ekonomi kreatif untuk terus memberikan masukan kebaruan dalam pengembangan Desa Wisata yang ada di Kabupaten Bandung. Adapun hal tersebut memang sejatinya diperlukan, keikutsertaan pemerintah desa secara aktif dan langsung dalam pengembangan program diharapkan menjadi pematuk kemajuan sektor yang diharapkan terlebih pemerintah desa sendiri secara struktural memiliki

posisi yang penting dalam otonomi daerah karena desa memiliki hak kebebasan untuk membuat peraturan dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah (16).

Akan tetapi kendati demikian, dalam beberapa tanggapan wawancara bersama informan, peneliti juga menemukan kendala terkait program BISIKAN DEWI, dimana kendala tersebut adalah mengenai frekuensi pelaksanaan kegiatan yang dinilai masih belum memenuhi kebutuhan dari para pegiat Desa Wisata. Tindak lanjut harapan terhadap peningkatan frekuensi kegiatan program BISIKAN DEWI ini tentunya beralasan didasarkan kepada kenyataan adanya perubahan terus menerus, baik dari segi teknologi, tren, maupun kebutuhan masyarakat terkhusus Desa Wisata. Selain itu, frekuensi keberlanjutan memastikan bahwa individu atau komunitas yang dilatih dapat beradaptasi dengan perkembangan baru dan tidak tertinggal.

Pelatihan berkesinambungan juga tentunya membantu memperkuat pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan memperbaiki praktik yang sudah ada agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan masa depan terlabih dalam pengembangan Desa Wisata. Program Frekuentatif juga penting untuk menjaga motivasi, konsistensi, dan kolaborasi antar pihak. Dalam banyak kasus, perubahan kepemimpinan, kebijakan, atau kondisi lingkungan dapat mempengaruhi efektivitas program yang sudah berjalan (17). Dengan adanya pelatihan dan penyuluhan berkelanjutan, berbagai pihak dapat tetap terkoordinasi dengan baik, menjaga kualitas pengelolaan, dan mempercepat kemajuan serta pengembangan yang berkesinambungan. Berdasarkan pada temuan-temuan tersebut, jika ditinjau dalam teori Peran Pinata & Gayatri mengenai motivasi dapat disebutkan bahwa bahwa fungsi motivator pemerintah daerah tidak hanya melibatkan pelatihan, tetapi juga menciptakan ekosistem kolaboratif yang mendukung keberlanjutan desa wisata. Dalam konteks tersebut, motivasi menjadi elemen penting yang memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap pengembangan sektor pariwisata di tingkat desa.

### Peran Sebagai Fasilitator

Dalam bagian ini, peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung sebagai fasilitator ialah dalam hal memfasilitasi dan mendukung segala kegiatan yang di perlukan untuk meningkatkan potensi wisata, baik fasilitas fisik maupun fasilitas non fisik yang mendukung segala program pariwisata yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung(18).

Dalam kasus ini, peran fasilitator yang dilakukan adalah dengan merumuskan sebuah program pelatihan terhadap pegiat Desa-Desa wisata di Kabupaten Bandung seperti program pelatihan pemandu wisata *outbond*, pelatihan tata kelola Desa wisata, pelatihan pengelolaan *homestay* dan pelatihan lainnya. Adapun dalam orientasi akhir dari pelatihan tersebut ditujukan untuk pengembangan dan kemajuan Desa-Desa wisata di Kabupaten Bandung yang kemudian dalam proses pelaksanaanya Dinas Kabupaten Bandung bekerjasama menggaet akademisi seperti Universitas baik negeri ataupun swasta sebagai sumber informasi dan SDM terlatih dalam memberikan pelatihan-pelatihan yang dimaksud.

Adapun kemudian hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Garcinia dan Kikim Rahman Hakim sebagai Jafung Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam wawancara bersama penulis menyebutkan bahwa :

“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung selalu memberikan pelatihan-pelatihan yang terbaik untuk pengelola Desa-Desa wisata, karena bertujuan untuk kemajuan dalam pengembangan Desa-Desa wisata di Kabupaten Bandung.



Pelatihan tersebut cukup rutin dilakukan setiap tahun, khususnya yang berkaitan dengan amenitas, pengelolaan wisata, dan lain sebagainya”. (Wawancara dengan Mita Garcinia dan Kikim Rahman Hakim pada tanggal 12 Juni 2024)

Dalam pelaksanaannya sendiri, program seperti pelatihan *homestay* dilakukan dengan mempertimbangan beberapa hal seperti (1) Manajemen Operasional, Mempelajari cara mengelola operasional harian *homestay*, termasuk manajemen kamar, layanan pelanggan, dan pengelolaan staf. (2) Penyambutan dan Pelayanan Tamu meliputi: Teknik dan etika dalam menyambut (3) Kebersihan dan Perawatan Properti (4) Pemasaran dan Promosi: meliputi strategi untuk mempromosikan *homestay* secara efektif, baik melalui media sosial, website, ataupun platform pemesanan online, serta bagaimana meningkatkan daya tarik *homestay* melalui *branding* dan ulasan positif (5) Pengelolaan Keuangan dan terakhir (6) Kepatuhan Hukum, Standar Keselamatan dan Pelayanan Wisatawan Asing.



**Gambar 2.** Pelatihan Pengelolaan Homestay  
*Sumber : Instagram disbudpar.kabbdg*

Selain program pelatihan *homestay*, program pelatihannya lainnya seperti program pelatihan tata kelola destinasi wisata juga dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Wisata Kabupaten Bandung sebagai langkah lanjut dari peran Fasilitator Dinas Kebudayaan dan Wisata Kabupaten Bandung terhadap pengembangan Desa Wisata.



**Gambar 3** Program Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata  
*Sumber : Instagram disbudpar.kabbdg*

Dalam proses pelaksanaannya serta orientasi harapan dari program pelatihan tata kelola destinasi wisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada para pelaku pengelola Desa wisata ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi wisata lokal serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep tata kelola



destinasi pariwisata yang baik dan benar. Proses pelatihan program ini juga dilakukan secara kolaboratif terutama dengan pihak akademisi yang tentunya diharapkan mampu memberikan dorongan positif dalam prospek perkembangan tata kelola destinasi wisata.

Terlihat memang dalam segi peran fasilitator Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung terbilang menunjukan peran yang aktif terutama dalam merumuskan program-program pelatihan yang dianggap mampu menunjang perkembangan Desa Wisata di Kabupaten Bandung terutama pasca covid-19. Namun, dalam konteks peran fasilitator, efektivitas program ini masih belum optimal, menimbang secara peran fasilitator fisik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung yang selama penghimpunan data penelitian peneliti tidak menemukan satupun peran fasilitator fisik oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung baik itu dalam bentuk: sarana prasarana, infrakstruktur (jalan, sumber energi dll), ataupun hingga pembantuan pengadaan pembangunan wisata dan tempat rekreasi. Padahal dalam beberapa tanggapan infoman khususnya pegiat desa, peran fasilitator fisik ini menjadi point utama dalam rencana awal pengembangan destinasi wisata.

Kendati mungkin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung tidak memiliki anggaran yang teruju terhadap pengadaan fisik sebagai fasilitator, peneliti kira Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung seharusnya bisa memberikan arahan terkait sumber-sumber dana lainnya yang dianggap mampu menjadi penunjang perkembangan Desa Wisata seperti CSR perusahaan dan sebagainya, agar kedepannya desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Bandung tidak terus menggunakan dana Desa sebagai pasokan utama dalam pengembangan Desa Wisata(19).

### **Peran Sebagai Dinamisator**

Terakhir dalam pembahasan teori peran yang digunakan peneliti, adalah terkait Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam hal Dinamisator yang dalam konteks penelitian ini tertuju kepada kebijakan kolaboratif atau kerja sama dengan berbagai pihak termasuk akademisi, Dinas atau Instansi dan pihak swasta lainnya yang tentunya dianggap mampu menjadi pedongkrak perkembangan Desa Wisata di Kabupaten Bandung Pasca Covid-19(20).

Adapun dalam temuan peneliti, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung secara aktif terlibat kerjasama dengan pihak akademisi baik itu tingkat Universitas Negeri ataupun Swasta yang dalam durasi kerjasanya seminimal mungkin dilaksanakan selama 2 (dua) tahun. Kerjasama tersebut tentunya ditujukan untuk membantu pengembangan Desa wisata yang ada di Kabupaten Bandung terutama dalam *point* tridarma Universitas yang salah satunya memerlukan pengabdian dosen dan mahasiswa yang kerap dilakukan dalam bentuk pembinaan serta pelatihan yang bisa ditujukan kepada pengembangan Desa-Desa wisata di Kabupaten Bandung.



**Gambar 3.** Dokumentasi photo pembentukan kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*Sumber : Instagram disbudpar.kabbdg*

Gerakan kolaboratif ini tentunya ditujukan untuk beberapa tujuan yang baik terutama dalam pengembangan Desa Wisata dimana beberapa tujuan tersebut diantaranya adalah: (1) Peningkatan Kualitas SDM pengelola Desa Wisata (2) Pengembangan Penelitian yang adaptif (3) Pengabdian kepada Masyarakat (4) Pengembangan Potensi wilayah khususnya memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Bandung dengan mendungan akademisi sebagai informan profesional (5) bentuk langsung dari Sinergi Antara Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat terakhir (6) *Sustainable Tourism* (Pariwisata Berkelanjutan) yang secara keseluruhan nilai penting kolaboratif ini ditujukan untuk mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bandung dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi dari universitas, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui sinergi yang berkelanjutan sebagai mana studi yang dilakukan di Kabupaten Pesawaran dimana, *collaborative governance* menjadi salah satu pemicu keberlanjutan sebagai bentuk komitmen bersama (21).

Adapun kemudian dalam catatan penelitian dan temuan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung juga mengadakan kolaborasi yang sama dengan beberapa lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung seperti: Politeknik Negeri Bandung, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University, Fakultas Industri Kreatif Telkom University, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ma'soem dan Fakultas Pertanian serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ma'soem, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung terakhir Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari – ABA Bandung. Selain dari pada lembaga pendidikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung juga terlibat kerjasama dengan pihak Instansi pemerintahan lainnya yang ada di Kabupaten Bandung seperti pelatihan keterampilan yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKER) Kabupaten Bandung.

Terlihat dalam peran dinamisator ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung secara masif melakukan berbagai upaya kolaboratif yang dianggap mampu memberikan manfaat signifikan terhadap pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bandung terlebih dalam perjalanannya sendiri kolaboratif antar lembaga ini akan terus meningkat hingga berbasis pada model pentahelix (pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media) yang dalam orientasi tujuannya memberikan banyak manfaat seperti: Peningkatan Daya Saing dan Profesionalisme Desa Wisata, Pelestarian Budaya dan Lingkungan, Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Promosi Efektif Melalui Media, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Wisata hingga Penciptaan Jaringan dan Ekosistem Pariwisata

yang kuat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang didapatkan selama dilapangan. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam pengembangan Desa Wisata pasca covid-19 dapat disimpulkan dengan ini sudah berjalan dengan cukup baik. Adapun dasar pertimbangan tersebut adalah: Sebagai motivator, dinas sudah meluncurkan program BISIKAN DEWI (Bincang Strategi Kembangkan Desa Wisata) yang meliputi penyuluhan dan pembekalan desa-desa wisata yang tentunya menjadi sebuah stimulus terhadap prospek perkembangan desa wisata. Kemudian, sebagai fasilitator, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung juga telah mengadakan berbagai pelatihan-pelatihan sebagai peran fasilitator non fisik terkhusus kepada pengelolaan desa wisata, seperti kegiatan pelatihan pemandu wisata, tata kelola desa, dan pengelolaan *homestay* yang tentunya dalam hal ini memiliki dampak yang baik bagi pengembangan Desa wisata yang ada.

Kemudian, peran sebagai dinamisator, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung juga telah berhasil menjalin beberapa kerjasama dengan instansi lain, seperti DISNAKER Kabupaten Bandung termasuk diantaranya beberapa lembaga pendidikan seperti universitas, guna mendukung pengembangan desa wisata serta sebagai model awal pengembangan kerjasama pentahelix dalam pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bandung. Namun dalam hal ini ada beberapa catatan penelitian yang menjadi sorotan peneliti mengenai pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bandung yaitu mengenai beberapa hambatan non-teknis yang dihadapi dinas dalam menjalankan perannya seperti: pertama masih kurangnya frekuentif program yang dijalankan oleh dinas, kedua peran fasilitator fisik yang dinilai masih jauh dari kata baik dimana hal tersebut diperparah dengan masih adanya hambatan non teknis dari pemerintahan desa terutama dalam hal transisi pergantian kepemimpinan di tingkat desa, yang menyebabkan terjadinya penurunan dukungan dari pemerintah desa yang mengalami perubahan terutama dalam hal pengelolaan desa wisata, dan termasuk permasalahan administrasi. Sebagai contoh, Desa Wisata Baros mengalami masalah setelah pergantian kepala desa, Desa Wisata Loa menghadapi minimnya dukungan serta keseriusan dari pihak pemerintah desa dan Desa Jelekong yang mengalami permasalahan dalam administrasi dikarenakan adanya perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan. Sebagai penutup, penelitian ini dalam harapannya mampu memberikan penegasan bahwa peningkatan koordinasi lintas sektor serta penguatan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan adalah faktor yang penting untuk di tindak lanjuti.

## Daftar Pustaka

1. Eva Elviana EDWAAvenzoar. Upaya Peningkatan Citra Kawasan Wisata Budaya Pada Sanggraloka Sekar Wilis Ponorogo. Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan. 2021;13(1):1–6.
2. Penulis N, Setiawan T. Proses Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Desa (RIPPDDes) Tahun 2023-2028 di Desa Wisata Wanasari, Kabupaten Bandung Corresponding Author. 2024;1(11). Available from: <https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/index>
3. Yusri A. Pengembangan Political Will Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren Di Koto Tuo Barat Kecamatan Xiii Koto Kampar.

4. Hendriyani. <https://www.kemenparekraf.go.id>. 2024. p. 1–2 Menparekraf Resmi Luncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (Adwi) 2024 Siaran Pers.
5. AgusSupriatna. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di desa rawabogo kecamatan ciwidey kabupaten bandung provinsi jawa barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*. 2020;12(3):561–78.
6. AR MS. Perencanaan Strategis dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bandung (Suatu Kajian di Kecamatan Ciwidey). *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*. 2023 Apr 30;8(1):901.
7. Ulfa R, Asrida W, Amin M, Wicaksono B, Kunci K, Kebijakan :, et al. Analisis Faktor-Faktor Dalam Pembangunan Di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
8. Alma Widiarti HNFD. Persepsi Wisatawan Domestik Mengenai Ekowisata Di Wana Wisata Kawah Putih (Local Tourist Perceptions on Eco-Tourism in Wana Wisata Kawah Putih). *Journal of Tourism Destination and Attraction*. 2021;9(2):2685–6026.
9. Kurniasih D, Suhendar C. *Jurnal administrasi Pemerintahan Desa*, V2.i1. 2021; Available from: <http://village.id/index.php/village>
10. Suryana M, Raka S, Putri S, Politeknik U, Bandung N. Identifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Desa Wisata Lebak Muncang Kabupaten Bandung. Vol. 25, *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. 2020.
11. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. <https://jabar.jadesta.com/sebaran>. 2024. p. 1–1 Peserta Anugerah Desa Wisata 2024.
12. Basri Bado. Model pendekatan kualitatif: Telaah dalam metode penelitian ilmiah. Sukoharjo: Tahta Media; 2022.
13. Purnawati L. Peranan Pemerintah Desa dalam Menangani Konflik Peternakan Ayam Broiler di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2020 Dec 31;19(2):229–43.
14. Titi Stiawati. Penyelenggara Pelayanan Publik yang bermutu di Pemerintah Daerah. In: *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011*. Serang: LAB-ANE FISIP Untirta; 2011. p. 215–2019.
15. Eko Wardono, Asmorowati S, Suaedi F, Setijaniningrum E. Sustainability Strategy in Transforming Revolving Fund Management: Case Study of the Ex-National Program for Independent Community Empowerment Rural in Tuban Regency. *Journal of Governance and Administrative Reform*. 2024 Jun 30;5(1):52–67.
16. Putra IMAWW, Huda MN. Implementasi Good Village Governance dalam Pengembangan Industri Pariwisata. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan [Internet]*. 2022 Dec 31;21(2):145–60. Available from: <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/365>
17. Sultan M, Endah K, Adityawarman A. Efektivitas Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government [Internet]*. 2025 Aug 7;9(1). Available from: <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JIRReG/article/view/573>
18. Ahmad Mustanir. Perencanaan Mewujudkan Kehidupan Pemerintahan dan Sosial Yang Islami di Desa Tonrong Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. In: *Prosiding Seminar Nasional Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan*. Samarinda: FISIP Universitas Mulawarman; 2016. p. 289–306.
19. Widiyaningrum WY, Riaji IAR. Collaborative Governance on Mangrove Rehabilitation by Indralayang Village and PT. PLN West Java at Karang Modang. In 2023. p. 1148–60.

20. Maulia EI, Setiyono B. Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata [Internet]. Available from: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id)
21. Lestari UF, Saputra WA. Collaborative Governance Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis) Kabupaten Pesawaran. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*. 2023 Dec 29;7(2):68–76.